RAHASIA KEMAJUAN NEGARA-NEGARA NORDIK

unduh dokumen di link dibawah ini

https://nordicwelfare.org/wp-content/uploads/2026/04/Nordic-Welfare-Forum-2025-Nordic-trust-in-a-changing-world.pdf?utm_source=chatgpt.com

https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2018/05/is-the-last-mile-the-longest-economic-gains-from-gender-equality-in-nordic-countries_g1g8d587/9789264300040-en.pdf

https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2022/03/drivers-of-trust-in-public-institutions-in-norway_1b4b4ae9/81b01318-en.pdf

https://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:908787/FULLTEXT01.pdf

Sepuluh Pilar Pembangunan yang Membawa Finlandia, Denmark, Swedia, Norwegia, dan Islandia Menuju Kesejahteraan

Artikel Kajian Pembangunan, Tata Kelola Pemerintahan, dan Kesejahteraan Masyarakat

HALAMAN 1 — PENDAHULUAN: MENGAPA NEGARA-NEGARA NORDIK MAMPU MAJU?

Negara-negara Nordik, yang meliputi Finlandia, Denmark, Swedia, Norwegia, dan Islandia, sering menjadi perhatian dunia karena kemampuannya menggabungkan kemakmuran ekonomi, kualitas hidup, pelayanan publik, dan perlindungan sosial. Negara-negara tersebut dikenal memiliki institusi publik yang relatif kuat, tingkat pendidikan tinggi, partisipasi tenaga kerja yang luas, serta sistem perlindungan sosial yang berkembang.

Keberhasilan tersebut menarik karena negara-negara Nordik tidak memilih salah satu dari dua kutub pembangunan secara mutlak. Mereka tidak sepenuhnya menyerahkan kesejahteraan kepada mekanisme pasar, tetapi juga tidak menghapus peran dunia usaha. Sebaliknya, mereka membangun hubungan antara ekonomi pasar, pemerintahan yang kuat, sistem perpajakan, dan pelayanan sosial.

Laporan Nordic Council of Ministers menjelaskan bahwa model Nordik menggabungkan tingkat pendidikan yang tinggi, investasi penelitian dan inovasi, perlindungan kesejahteraan, serta kemampuan ekonomi untuk beradaptasi terhadap perubahan. Meski demikian, negara-negara ini tetap menghadapi tantangan berupa penuaan penduduk, perubahan ekonomi global, ketimpangan, dan kebutuhan mempertahankan produktivitas.

Sumber: State of the Nordic Region 2020.

Hal penting yang perlu dipahami adalah bahwa kemajuan negara Nordik bukan hasil satu kebijakan ajaib. Tidak ada satu program yang dengan sendirinya mampu menjadikan sebuah negara makmur. Keberhasilan mereka merupakan hasil akumulasi kebijakan selama puluhan tahun, perbaikan institusi, investasi pada manusia, dan kesediaan melakukan penyesuaian ketika sistem yang ada tidak lagi memadai.

Indonesia dapat mempelajari pengalaman tersebut tanpa harus menyalin seluruh sistemnya. Jumlah penduduk, kondisi geografis, struktur ekonomi, kemampuan fiskal, dan sejarah kelembagaan Indonesia berbeda dari negara-negara Nordik.

Pertanyaan yang lebih penting bukanlah bagaimana membuat Indonesia menjadi salinan Finlandia atau Denmark, melainkan bagaimana mengambil prinsip-prinsip yang terbukti berguna dan menyesuaikannya dengan kebutuhan Indonesia.

Artikel ini membahas sepuluh pilar yang membantu menjelaskan keberhasilan pembangunan Nordik, sekaligus memberikan pelajaran yang dapat dipertimbangkan dalam pembangunan nasional dan pemerintahan daerah di Indonesia.

— PILAR PERTAMA: PEMERINTAHAN YANG DIPERCAYA DAN INSTITUSI YANG KUAT

Kemajuan ekonomi membutuhkan lebih dari sekadar sumber daya alam, modal, dan tenaga kerja. Negara juga memerlukan institusi yang mampu membuat aturan secara konsisten, menggunakan anggaran secara bertanggung jawab, serta memberikan pelayanan publik secara adil.

Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menjadi salah satu unsur penting dalam model Nordik. Ketika masyarakat percaya bahwa pajak digunakan untuk kepentingan bersama, aturan berlaku secara relatif adil, dan pelayanan dapat diakses tanpa perlakuan istimewa, kesediaan untuk bekerja sama dengan pemerintah menjadi lebih kuat.

Kepercayaan tersebut bukan semata-mata persoalan budaya. Ia perlu dipelihara melalui pengalaman sehari-hari masyarakat ketika berhubungan dengan institusi publik. Pelayanan yang jelas, prosedur yang sederhana, informasi yang terbuka, dan mekanisme pengaduan yang berfungsi dapat memperkuat keyakinan masyarakat bahwa pemerintah bekerja untuk kepentingan umum.

Sebaliknya, korupsi, ketidakpastian aturan, pelayanan yang diskriminatif, dan penggunaan anggaran yang tidak transparan dapat mengikis kepercayaan. Dalam keadaan demikian, masyarakat mungkin merasa bahwa membayar pajak tidak menghasilkan manfaat yang sebanding.

Pengalaman negara-negara Nordik menunjukkan pentingnya membangun pemerintahan yang memiliki kapasitas administratif, bukan hanya memiliki banyak peraturan. Peraturan yang baik harus didukung oleh aparatur yang kompeten, sistem pengawasan, dan kemampuan untuk menindaklanjuti kebijakan.

Pelajaran bagi Indonesia

Pertama, setiap instansi perlu memiliki standar pelayanan yang terukur. Waktu penyelesaian, persyaratan, biaya, dan jalur pengaduan harus jelas bagi masyarakat.

Kedua, keterbukaan informasi harus disertai pertanggungjawaban. Publikasi dokumen dan laporan tidak cukup apabila informasi tersebut sulit dipahami atau tidak dapat digunakan untuk mengawasi kinerja.

Ketiga, pengawasan harus berorientasi pada perbaikan. Kesalahan administratif perlu diperbaiki, pelanggaran harus ditindak sesuai aturan, dan hasil evaluasi harus digunakan untuk mencegah masalah serupa.

Keempat, kualitas pelayanan perlu dinilai dari pengalaman masyarakat, bukan hanya dari jumlah dokumen yang diterbitkan atau kegiatan yang dilaksanakan.

Pemerintahan yang dipercaya tidak terbentuk melalui slogan. Ia terbentuk ketika masyarakat berulang kali mengalami pelayanan yang baik, adil, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.

— PILAR KEDUA: PENDIDIKAN SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG

Salah satu fondasi kemajuan Nordik adalah perhatian terhadap pendidikan dan keterampilan. Pendidikan dipandang bukan hanya sebagai kebutuhan individu, tetapi juga sebagai investasi untuk membangun produktivitas, inovasi, dan kemampuan masyarakat menghadapi perubahan.

Pendidikan yang baik memperluas kemampuan seseorang untuk memperoleh pekerjaan, memahami informasi, mengambil keputusan, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Pada tingkat nasional, tenaga kerja yang terampil membantu perusahaan meningkatkan kualitas produk, mengadopsi teknologi, dan menciptakan kegiatan ekonomi bernilai tambah tinggi.

Namun, keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh lamanya seseorang bersekolah. Kualitas pembelajaran, kompetensi guru, relevansi kurikulum, dukungan terhadap anak yang mengalami kesulitan, dan hubungan antara pendidikan dengan kebutuhan masyarakat juga sangat penting.

Finlandia sering mendapat perhatian karena sistem pendidikannya. Akan tetapi, keberhasilan Finlandia tidak dapat dijelaskan hanya dengan satu metode mengajar. Kualitas guru, kebijakan pendidikan, dukungan terhadap peserta didik, dan lingkungan sosial merupakan bagian dari sistem yang lebih luas.

Pendidikan juga perlu berlangsung sepanjang kehidupan. Perubahan teknologi menyebabkan keterampilan yang dibutuhkan dunia kerja terus berkembang. Karena itu, pendidikan vokasi, pelatihan kerja, pendidikan orang dewasa, dan peningkatan keterampilan pekerja menjadi bagian penting dari strategi pembangunan.

Pelajaran bagi Indonesia

Pemerintah perlu memperhatikan kualitas pembelajaran, bukan sekadar angka partisipasi sekolah atau jumlah bangunan pendidikan.

Sekolah perlu memberikan fondasi kuat dalam membaca, menulis, matematika, sains, literasi digital, dan kemampuan memecahkan masalah. Keterampilan komunikasi, kerja sama, tanggung jawab, dan etika juga perlu dikembangkan.

Hubungan antara sekolah, perguruan tinggi, pemerintah, dan dunia usaha perlu diperkuat agar pendidikan lebih sesuai dengan kebutuhan ekonomi. Namun, pendidikan tidak boleh dibatasi hanya untuk memenuhi kebutuhan industri saat ini; ia juga harus membentuk warga yang mampu berpikir kritis dan belajar mandiri.

Pemerataan menjadi hal penting lainnya. Anak di desa, wilayah terpencil, dan keluarga berpenghasilan rendah harus memiliki kesempatan memperoleh pendidikan bermutu.

Dalam jangka panjang, pendidikan merupakan salah satu cara paling mendasar untuk mengurangi kemiskinan antargenerasi. Dampaknya tidak selalu terlihat dalam satu tahun anggaran, tetapi dapat menentukan kualitas tenaga kerja dan kapasitas bangsa selama puluhan tahun.

— PILAR KETIGA: EKONOMI PRODUKTIF DAN DUNIA USAHA YANG KOMPETITIF

Negara sejahtera membutuhkan ekonomi yang mampu menghasilkan barang dan jasa bernilai tinggi. Perlindungan sosial dan pelayanan publik memerlukan sumber pembiayaan yang berkelanjutan. Tanpa produktivitas dan basis ekonomi yang kuat, pemerintah akan kesulitan membiayai kebutuhan masyarakat.

Negara-negara Nordik mengembangkan ekonomi yang terbuka terhadap perdagangan internasional. Perusahaan dapat bersaing di pasar global, mengadopsi teknologi, dan mengembangkan produk yang memiliki nilai tambah. Sejumlah perusahaan besar Nordik beroperasi di bidang industri, farmasi, transportasi, telekomunikasi, energi, dan teknologi digital.

Keterbukaan ekonomi memberikan kesempatan, tetapi juga menghadirkan risiko. Perusahaan domestik harus meningkatkan kualitas agar dapat bersaing. Pekerja perlu memperoleh keterampilan baru ketika industri berubah. Pemerintah harus membantu masyarakat menghadapi perubahan tanpa menghilangkan dorongan untuk berinovasi.

Laporan tentang model ekonomi Nordik menekankan bahwa ekonomi terbuka, pasar tenaga kerja yang berkembang, dan sistem kesejahteraan dapat berjalan berdampingan, meskipun hubungan di antara ketiganya memerlukan penyesuaian kebijakan secara terus-menerus.

Sumber: The Nordic Model: Embracing Globalization and Sharing Risks.

Produktivitas merupakan unsur penting. Sebuah negara tidak menjadi makmur hanya karena penduduknya bekerja lebih lama. Kemakmuran juga dipengaruhi oleh kualitas

teknologi, keterampilan, organisasi kerja, infrastruktur, akses pasar, dan kemampuan menghasilkan lebih banyak nilai dari sumber daya yang tersedia.

Pelajaran bagi Indonesia

Pembangunan ekonomi perlu mengutamakan peningkatan produktivitas usaha kecil dan menengah, penguatan industri pengolahan, modernisasi pertanian, pengembangan ekonomi digital, dan peningkatan kualitas tenaga kerja.

Pemerintah juga perlu menciptakan iklim usaha yang dapat diprediksi. Prosedur perizinan yang jelas, kepastian hukum, infrastruktur yang memadai, dan persaingan usaha yang sehat membantu perusahaan mengambil keputusan investasi.

Dukungan kepada dunia usaha sebaiknya dikaitkan dengan hasil yang terukur, misalnya peningkatan produktivitas, penciptaan pekerjaan formal, peningkatan keterampilan pekerja, dan kemampuan memasuki pasar yang lebih luas.

Negara tidak harus memilih antara ekonomi yang kompetitif dan masyarakat yang sejahtera. Tantangannya adalah merancang kebijakan agar pertumbuhan ekonomi menciptakan pekerjaan yang baik sekaligus menyediakan sumber daya bagi pelayanan publik.

— PILAR KEEMPAT: PAJAK YANG MEMBIAYAI PELAYANAN PUBLIK

Negara-negara Nordik dikenal memiliki penerimaan pajak yang relatif tinggi dibandingkan banyak negara lain. Pajak tersebut mendukung pembiayaan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur, dan berbagai layanan publik.

Namun, tingginya pajak bukan penjelasan tunggal bagi kemajuan Nordik. Hal penting adalah hubungan antara penerimaan negara, kualitas belanja publik, kepatuhan pajak, dan kepercayaan masyarakat.

Kajian ekonom Henrik Jacobsen Kleven, berjudul *How Can Scandinavians Tax So Much?*, membahas beberapa unsur yang membantu negara-negara Skandinavia mengumpulkan penerimaan pajak: pelaporan informasi pihak ketiga yang luas, basis pajak yang relatif luas, serta dukungan terhadap kegiatan yang memungkinkan masyarakat bekerja, termasuk layanan yang membantu keluarga mengatur pengasuhan anak.

Sumber: How Can Scandinavians Tax So Much? — Journal of Economic Perspectives.

Sistem perpajakan yang efektif membutuhkan administrasi yang mampu mengidentifikasi penghasilan secara akurat, mengurangi peluang penghindaran pajak, dan memperlakukan wajib pajak secara konsisten. Digitalisasi dapat membantu, tetapi tetap memerlukan perlindungan data, prosedur keberatan, dan pengawasan.

Di sisi lain, penerimaan pajak yang besar tidak otomatis menghasilkan kesejahteraan. Apabila anggaran dibelanjakan secara tidak efektif, manfaat yang diterima masyarakat

dapat menjadi kecil. Karena itu, kualitas belanja sama pentingnya dengan kemampuan mengumpulkan penerimaan.

Pelajaran bagi Indonesia

Pertama, pemerintah perlu memperluas kepatuhan pajak melalui administrasi yang mudah, informasi yang jelas, dan penegakan aturan yang adil.

Kedua, belanja publik perlu dikaitkan dengan hasil. Anggaran pendidikan harus memperbaiki pembelajaran; anggaran kesehatan harus memperluas akses dan meningkatkan mutu pelayanan; sedangkan belanja infrastruktur harus memperbaiki konektivitas dan produktivitas.

Ketiga, masyarakat perlu dapat melihat hubungan antara pajak yang dibayarkan dan manfaat pelayanan yang diterima.

Keempat, evaluasi belanja harus dilakukan secara terbuka dan berkelanjutan.

Indonesia tidak dapat serta-merta meniru tarif pajak Nordik. Tingkat pendapatan, struktur ekonomi, kemampuan administrasi, dan kebutuhan pembangunannya berbeda. Prinsip yang lebih penting untuk dipelajari adalah membangun sistem penerimaan yang adil dan mengubah penerimaan tersebut menjadi manfaat publik yang nyata.

— PILAR KELIMA: PERLINDUNGAN SOSIAL TANPA MEMATIKAN PRODUKTIVITAS

Sistem kesejahteraan Nordik berupaya melindungi masyarakat dari risiko yang dapat mengganggu kehidupan, seperti penyakit, kehilangan pekerjaan, kemiskinan, disabilitas, dan kebutuhan pengasuhan keluarga.

Perlindungan sosial bukan sekadar pemberian bantuan ketika seseorang sudah jatuh miskin. Sistem yang baik juga mencegah kemiskinan melalui pendidikan, layanan kesehatan, dukungan keluarga, pelatihan kerja, dan akses terhadap kesempatan ekonomi.

Pendekatan ini membantu masyarakat menghadapi perubahan. Seorang pekerja mungkin kehilangan pekerjaan karena teknologi atau perubahan pasar, tetapi dukungan yang tepat dapat membantunya memperoleh keterampilan baru dan kembali bekerja.

Sebagian negara Nordik dikenal menerapkan berbagai bentuk kebijakan pasar kerja aktif. Denmark, misalnya, sering dibahas melalui konsep *flexicurity*, yaitu perpaduan antara fleksibilitas pasar kerja, perlindungan pendapatan, dan kebijakan untuk membantu pencari kerja kembali bekerja. Pelaksanaannya tetap bergantung pada institusi dan kondisi nasional.

Perlindungan sosial juga berhubungan dengan partisipasi tenaga kerja perempuan dan laki-laki. Layanan pengasuhan anak, cuti orang tua, dan dukungan keluarga dapat

membantu orang tua mempertahankan pekerjaan sekaligus memenuhi tanggung jawab pengasuhan.

Namun, sistem kesejahteraan memiliki tantangan. Biaya pelayanan meningkat ketika penduduk menua, sedangkan kebutuhan tenaga kerja dan penerimaan negara juga berubah. Karena itu, keberlanjutan keuangan harus menjadi bagian dari desain kebijakan.

Pelajaran bagi Indonesia

Perlindungan sosial sebaiknya tepat sasaran, mudah diakses, dan terhubung dengan pelayanan lain. Data penerima perlu diperbarui, mekanisme pengaduan harus tersedia, dan program perlu dievaluasi berdasarkan manfaatnya.

Bantuan sosial tetap penting, tetapi perlu dilengkapi dengan peningkatan keterampilan, dukungan usaha produktif, layanan kesehatan, dan akses pekerjaan yang layak.

Pemerintah juga perlu menghindari dua kesalahan. Pertama, menganggap semua persoalan kemiskinan dapat diselesaikan dengan bantuan tunai. Kedua, menganggap penerima bantuan tidak membutuhkan dukungan struktural lain.

Tujuan sistem kesejahteraan bukan membuat masyarakat bergantung selamanya pada pemerintah, melainkan memastikan bahwa risiko kehidupan tidak menghancurkan kesempatan seseorang untuk berkembang.

— PILAR KEENAM: INOVASI, RISET, DAN DIGITALISASI

Negara yang maju perlu mampu memperbarui cara memproduksi barang, memberikan layanan, dan menyelesaikan persoalan masyarakat. Karena itu, penelitian, pengembangan teknologi, dan inovasi menjadi bagian penting dari pembangunan Nordik.

Inovasi tidak terbatas pada penemuan teknologi baru. Inovasi juga dapat berupa perbaikan proses pelayanan publik, metode pembelajaran, sistem logistik, pengelolaan energi, dan cara perusahaan menggunakan data untuk meningkatkan produktivitas.

Negara-negara Nordik memiliki ekosistem inovasi yang melibatkan perguruan tinggi, perusahaan, lembaga penelitian, pemerintah, dan investor. Ekosistem seperti ini memerlukan waktu untuk berkembang karena inovasi bergantung pada keterampilan, pendanaan, budaya organisasi, dan kemampuan menghubungkan pengetahuan dengan kebutuhan nyata.

Digitalisasi juga membantu penyederhanaan layanan. Ketika data dapat digunakan secara aman dan sistem saling terhubung, masyarakat berpotensi mengurangi kebutuhan untuk menyerahkan dokumen yang sama berulang kali. Pemerintah dapat memproses permohonan lebih cepat dan menggunakan data untuk mengidentifikasi masalah.

Namun, digitalisasi tidak selalu berarti kemajuan. Sistem yang buruk dapat memindahkan kerumitan dari loket ke layar komputer. Masyarakat yang tidak memiliki perangkat, akses internet, atau keterampilan digital juga dapat tertinggal.

Oleh karena itu, teknologi perlu dibangun berdasarkan kebutuhan pengguna. Keamanan informasi, perlindungan privasi, interoperabilitas, dan akses bagi penyandang disabilitas harus menjadi bagian dari perencanaan.

Pelajaran bagi Indonesia

Pemerintah daerah dapat memulai inovasi dari masalah yang jelas: lamanya pelayanan, data yang tidak sinkron, kesulitan masyarakat mengakses informasi, atau proses administrasi yang berulang.

Setiap inovasi perlu memiliki ukuran keberhasilan. Apakah waktu pelayanan berkurang? Apakah biaya masyarakat turun? Apakah kesalahan data berkurang? Apakah akses kelompok rentan membaik?

Pemerintah juga dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi, sekolah vokasi, komunitas teknologi, dan dunia usaha untuk menguji solusi yang sesuai dengan kondisi lokal.

Yang perlu ditiru dari negara Nordik bukan sekadar aplikasi atau perangkat lunaknya. Hal yang lebih mendasar adalah kemampuan institusi untuk belajar, melakukan percobaan secara bertanggung jawab, mengevaluasi hasil, dan memperbaiki sistem berdasarkan bukti.

— PILAR KETUJUH: KESETARAAN KESEMPATAN DAN PASAR KERJA YANG INKLUSIF

Kesenjangan ekonomi dapat menghambat pembangunan ketika sebagian masyarakat tidak memiliki akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, atau modal untuk mengembangkan kemampuan. Karena itu, negara-negara Nordik memberikan perhatian pada pemerataan kesempatan dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi.

Kesetaraan kesempatan tidak berarti setiap orang harus memiliki penghasilan yang sama. Intinya adalah mengurangi hambatan yang membuat seseorang tidak dapat mengembangkan potensinya hanya karena kondisi keluarga, jenis kelamin, lokasi tempat tinggal, atau latar belakang sosial.

Partisipasi perempuan dalam dunia kerja menjadi salah satu unsur penting. Layanan pengasuhan anak, kebijakan keluarga, pendidikan, dan perlindungan pekerja dapat membantu lebih banyak orang bekerja sesuai kemampuan mereka.

Sistem hubungan industrial juga berperan. Di sejumlah negara Nordik, organisasi pekerja dan pengusaha memiliki peran penting dalam perundingan upah serta kondisi kerja. Pola dan cakupannya berbeda antarnegara, tetapi dialog sosial dapat membantu

mencari keseimbangan antara kepentingan pekerja, keberlanjutan usaha, dan daya saing ekonomi.

Meskipun demikian, negara-negara Nordik tidak sepenuhnya bebas dari ketimpangan. Perbedaan pendapatan dan kekayaan tetap ada. Migrasi, perubahan struktur pekerjaan, perkembangan teknologi, serta perbedaan kesempatan antarwilayah menghadirkan tantangan tersendiri.

Pelajaran bagi Indonesia

Pemerataan pembangunan perlu diarahkan pada akses nyata terhadap kesempatan, bukan hanya pembagian anggaran yang sama untuk semua wilayah.

Wilayah dengan keterbatasan pendidikan, kesehatan, transportasi, dan konektivitas mungkin memerlukan dukungan yang lebih besar agar penduduknya memiliki kesempatan yang sebanding.

Pemerintah perlu memperkuat akses perempuan terhadap pekerjaan yang layak, meningkatkan keterampilan pekerja, mendorong keselamatan kerja, dan memperluas peluang bagi penyandang disabilitas.

Usaha mikro dan kecil juga perlu mendapat kesempatan mengakses pelatihan, teknologi, pembiayaan yang bertanggung jawab, dan pasar.

Pemerataan yang dirancang dengan baik dapat memperluas basis produktivitas nasional. Masyarakat yang sebelumnya terhambat untuk belajar, bekerja, dan berusaha dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian.

— PILAR KEDELAPAN DAN KESEMBILAN: PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN PEMERINTAHAN BERBASIS HASIL

Pilar kedelapan: pembangunan yang menjaga lingkungan

Negara Nordik menempatkan persoalan energi, lingkungan, dan perubahan iklim sebagai bagian dari agenda pembangunan. Namun, transisi menuju ekonomi rendah karbon tidak berlangsung tanpa konflik atau biaya. Kebijakan lingkungan perlu memperhitungkan dampaknya terhadap pekerja, rumah tangga, industri, dan wilayah yang bergantung pada sektor tertentu.

Pembangunan berkelanjutan berarti memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengabaikan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Artinya, pertumbuhan ekonomi harus mempertimbangkan kualitas udara, ketersediaan air, ketahanan energi, penggunaan lahan, dan risiko bencana.

Indonesia dapat mengambil pelajaran dengan mengembangkan transportasi publik, meningkatkan efisiensi energi, melindungi ekosistem, mengurangi sampah, serta mendorong industri yang lebih bersih.

Pemerintah daerah perlu menghubungkan kebijakan lingkungan dengan manfaat ekonomi dan sosial. Pengelolaan sampah, misalnya, bukan hanya masalah kebersihan, melainkan juga berkaitan dengan kesehatan, pekerjaan, pengelolaan bahan baku, dan kualitas lingkungan permukiman.

Transisi hijau harus dirancang secara adil. Pekerja dan wilayah yang terdampak perubahan industri membutuhkan pelatihan, kesempatan kerja baru, dan dukungan selama masa peralihan.

Pilar kesembilan: mengukur keberhasilan dari hasil, bukan hanya kegiatan

Pembangunan yang baik memerlukan indikator untuk menilai apakah kebijakan benar-benar memperbaiki kehidupan masyarakat.

Pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB tetap penting karena menunjukkan perkembangan kegiatan ekonomi. Namun, PDB tidak cukup untuk menggambarkan seluruh aspek kesejahteraan. Ia tidak secara langsung menunjukkan apakah masyarakat merasa aman, apakah pelayanan kesehatan mudah diakses, atau apakah kualitas lingkungan membaik.

Laporan *Towards a Nordic Wellbeing Economy* membahas pendekatan yang memasukkan indikator kesejahteraan ke dalam penentuan prioritas dan kebijakan pemerintah. Pendekatan ini menekankan bahwa ukuran kemajuan perlu melampaui angka pertumbuhan ekonomi semata.

Sumber: Towards a Nordic Wellbeing Economy.

Indonesia dapat menerapkan prinsip ini melalui indikator yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah, seperti tingkat kemiskinan, kualitas pendidikan, kesehatan, pengangguran, akses air bersih, waktu pelayanan administrasi, kepuasan warga, dan kualitas lingkungan.

Setiap program perlu memiliki tujuan, kondisi awal, target yang masuk akal, serta evaluasi berkala. Pemerintah harus membedakan antara kegiatan yang terlaksana dan manfaat yang benar-benar diterima masyarakat.

Dengan demikian, keberhasilan tidak hanya diukur dari berapa banyak rapat, pelatihan, aplikasi, atau bangunan yang dibuat, tetapi dari perubahan nyata yang dihasilkan.

— PILAR KESEPULUH: KONSISTENSI KEBIJAKAN DAN STRATEGI MENERAPKANNYA DI INDONESIA

Salah satu pelajaran penting dari pengalaman Nordik adalah bahwa pembangunan membutuhkan kesinambungan. Pendidikan, penelitian, infrastruktur, pelayanan kesehatan, dan reformasi administrasi tidak dapat diselesaikan dalam satu periode pemerintahan.

Kebijakan perlu memiliki arah jangka panjang, tetapi tetap terbuka terhadap evaluasi. Konsistensi tidak berarti mempertahankan program yang terbukti gagal. Konsistensi berarti menjaga tujuan pembangunan sambil memperbaiki cara mencapainya.

Negara-negara Nordik juga tidak memiliki sistem yang identik. Denmark, Finlandia, Islandia, Norwegia, dan Swedia mempunyai sejarah, struktur ekonomi, sistem politik, serta kebijakan yang berbeda. Karena itu, istilah "model Nordik" lebih tepat dipahami sebagai kumpulan karakteristik dan pengalaman yang memiliki kemiripan, bukan satu cetak biru yang sama persis untuk semua negara.

Tantangan mereka pun terus berubah. Penuaan penduduk, kebutuhan tenaga kerja, perubahan teknologi, persaingan global, dan tekanan terhadap keuangan publik menuntut penyesuaian kebijakan.

Strategi penerapan bagi Indonesia

Ada lima langkah yang dapat dipertimbangkan.

Pertama, menetapkan masalah prioritas. Pemerintah perlu menentukan persoalan paling mendesak berdasarkan data, bukan hanya mengikuti tren atau membuat program baru tanpa evaluasi.

Kedua, membangun kapasitas aparatur. Peningkatan kompetensi, integritas, kemampuan menggunakan data, dan kualitas manajemen menjadi prasyarat bagi kebijakan yang efektif.

Ketiga, menghubungkan anggaran dengan hasil. Program perlu memiliki indikator yang dapat diverifikasi, serta dievaluasi berdasarkan manfaat dan biaya yang dikeluarkan.

Keempat, memperkuat koordinasi pusat dan daerah. Persoalan pendidikan, kesehatan, transportasi, lingkungan, dan ketenagakerjaan sering melibatkan lebih dari satu lembaga. Koordinasi perlu disertai pembagian kewenangan dan tanggung jawab yang jelas.

Kelima, melakukan uji coba sebelum memperluas program. Kebijakan baru dapat diuji di wilayah atau kelompok tertentu, dievaluasi, kemudian diperbaiki sebelum diterapkan lebih luas.

PENUTUP: KEMAJUAN ADALAH HASIL PEMBANGUNAN MANUSIA DAN INSTITUSI

Kemajuan negara-negara Nordik tidak dapat dijelaskan hanya melalui pajak tinggi, bantuan sosial, atau kebijakan pendidikan tertentu. Kekuatan mereka terletak pada hubungan antara institusi yang berfungsi, pendidikan, ekonomi produktif, perlindungan sosial, inovasi, dan upaya mempertahankan kepercayaan masyarakat.

Sistem kesejahteraan membutuhkan ekonomi yang mampu menghasilkan pendapatan. Ekonomi yang produktif membutuhkan tenaga kerja terampil, infrastruktur, kepastian

aturan, dan inovasi. Pemerintahan yang efektif membutuhkan aparatur kompeten, informasi yang terbuka, serta mekanisme pertanggungjawaban. Semua unsur tersebut saling memengaruhi.

Indonesia tidak harus menyalin seluruh kebijakan Nordik. Perbedaan jumlah penduduk, tingkat pendapatan, kondisi geografis, kapasitas fiskal, dan struktur kelembagaan membuat penerapan langsung tidak selalu memungkinkan.

Namun, prinsip-prinsip dasarnya dapat menjadi bahan pembelajaran: pelayanan publik yang adil, pendidikan bermutu, ekonomi yang produktif, perlindungan sosial yang berkelanjutan, inovasi yang berguna, dan pembangunan yang dinilai berdasarkan hasil nyata.

Pada akhirnya, negara maju bukan hanya negara yang menghasilkan banyak kekayaan. Negara maju juga mampu mengubah kekayaan tersebut menjadi kesempatan bagi masyarakat, melindungi kelompok rentan, menjaga keberlanjutan lingkungan, dan membangun institusi yang dapat dipercaya.

Kunci pembelajaran dari negara Nordik adalah membangun sistem yang membuat kebijakan baik dapat dijalankan secara konsisten, diperiksa hasilnya, dan diperbaiki ketika tidak lagi efektif.

DAFTAR PUSTAKA DAN SUMBER BACAAN

1.

Nordic Council of Ministers. *State of the Nordic Region 2020*. https://pub.norden.org/nord2020-001/

2.
3.

Birkjær, Michael, Alexander Gamerdinger, dan Sarah El-Abd. 2021. *Towards a Nordic Wellbeing Economy*. Nordic Council of Ministers. https://pub.norden.org/nord2021-049/

4.
5.

Kleven, Henrik Jacobsen. 2014. “How Can Scandinavians Tax So Much?” *Journal of Economic Perspectives*, 28(4), 77–98. https://pubs.aeaweb.org/doi/10.1257/jep.28.4.77

6.
7.

Andersen, Torben M. dan kolega. 2007. *The Nordic Model: Embracing Globalization and Sharing Risks*. https://www.etla.fi/en/publications/b232-en/

8.
9.

Nordic Council of Ministers. *Economy and Finance*. https://www.norden.org/en/economy-and-finance

10.
11.

Nordregio. 2026. *State of the Nordic Region 2026*. https://nordregio.org/publications/state-of-the-nordic-region-2026/

12.

Catatan metodologis: Artikel ini merupakan sintesis pengantar berdasarkan sumber-sumber kebijakan dan kajian ekonomi Nordik. Hubungan antara kebijakan tertentu dan hasil pembangunan dapat berbeda menurut negara dan periode. Karena itu, rekomendasi untuk Indonesia perlu diuji dengan data lokal, evaluasi program, serta kajian fiskal dan kelembagaan sebelum diterapkan.